

Wacana Polisi Baru

Optimisme mekar di dada anak bangsa menyongsong lahirnya wacana Indonesia baru di rumah demokrasi rakyat, Senayan. Agar punya resonansi, dan terpenting benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak, maka semua elemen bangsa perlu memberikan sumbangan nyata.

Kapal republik dengan bendera merah-putih memang masih compang-camping, masuk dok untuk direparasi. Dinding yang selama ini bocor di sana-sini dimakan rayap dan tikus ganas tentu perlu ditambal. Agar mesin kapal republik tidak karatan dan bisa berputar kencang tentu perlu diolesi dengan oli penegakan dan supremasi hukum. Itulah konsensus semua elemen bangsa sehingga kapal republik yang sarat 210 juta penumpang kembali berlayar ke samudra luas, menggapai cakrawala.

Sebagai elemen bangsa di bidang penegakan hukum, tentu saja Polri harus tanggap dan secara nyata memberikan sumbangan pada wacana Indonesia baru. Ibarat mesin, maka oli reformasi di tubuh Polri perlu diolesi ke segenap personil, sehingga polisi sebagai hukum yang berjalan tak melencong. Tekadnya: Polri secara sadar memposisikan diri sebagai polisi rakyat.

Mendorong dan melecut kinerja Polri, berbagai kalangan, termasuk wakil rakyat menilai Polri perlu ruang gerak yang bersifat otonom. Dengan demikian dalam menjalankan tugas penegakan hukum, tak ada lagi cerita usang tentang rasa sungkan, tak berdaya karena intervensi dari kekuasaan. Tonggak penegakan hukum yang dipancang Polri di tengah masyarakat menjadi nyata senyata-nyatanya.

Wacana polisi baru agar memposisikan diri sebagai polisi rakyat, polisi yang membekali diri dengan pengetahuan yang memadai akan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi, kami sajikan kepada pembaca yang terhormat pada edisi *Rastra* di penghujung tahun ini. Selamat membaca.

Letkol. Pol. Drs. Kamaludin Lubis, SH

Pahami dan Tan

PEMICYNYA:

- Keadaan buruk di tengah-tengah masyarakat dibiarkan berlarut-larut
- Keluhan dan protes masyarakat tidak dihiraukan.
- Macetnya dialog dan komunikasi untuk menghadapi dan memecahkan persoalan itu.
- Terlalu lama kemerdekaan dan keleluasaan masyarakat dikekang
- Perangkat dan aparat yang menjadi instrumen pengekang dan penekan cenderung merajalela, tidak bersih, menyalahgunakan wewenang.
- Terjadi rasa tidak adil di tengah-tengah masyarakat.

DAMPAK MAIN HAKIM SENDIRI

Tindakan main hakim sendiri membawa konsekuensi dan implikasi yang meresahkan masyarakat serta merongrong kepastian dan wibawa hukum.

gapi Gejala Main Hakim Sendiri

ALASAN MAIN HAKIM SENDIRI:

Masyarakat mengambil oper nasibnya di tangan sendiri, yakni nasib lingkungan hidup yang sehat sejahtera, bersusila.

SASARAN MAIN HAKIM SENDIRI

- Tempat maksiat.
- Perjudian.
- Prostitusi.
- Pelaku Kejahatan.

BAGAIMANA MEMECAHKAN MASALAH:

- Secara terus menerus memberikan informasi tentang masalah yang digugat masyarakat
- Lakukan persuasi dan penindakan.
- Teguhkan dan tegakkan kembali integritas, kompetensi profesional dan disiplin aparat dan perangkat hukum.
- Ubah pendekatan dan otokrasi ke demokrasi, dari tertutupan ke serba terbuka, dari pengekangan ke kebebasan.